



# BRIEFING SUBSIDI ENERGI INDONESIA

Sebuah kajian dwi-bulanan tentang kebijakan subsidi energi Indonesia dan pasar energi

## SEPTEMBER 2014

Sebagai bagian dari aktivitas kami di sektor kebijakan energi dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia, Global Subsidies Initiative (GSI) dari International Institute for Sustainable Development (IISD) mempublikasikan sebuah terbitan berkala tentang isu-isu terkait subsidi energi. Untuk informasi lebih lanjut, harap hubungi Lucky Lontoh di alamat email lucky.lontoh@iisd.org dan Christopher Beaton di alamat cbeaton@iisd.org.

### Sorotan

- Presiden Yudhoyono menepis tawaran untuk menaikkan harga bahan bakar minyak dari Joko Widodo.
- Kebijakan untuk menekan konsumsi bahan bakar minyak pada Agustus 2014 dibatalkan akibat meningkatnya kegelisahan sosial yang mengiringi antrean panjang dan panic buying yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia.
- Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2015 meningkatkan alokasi subsidi bahan bakar menjadi IDR 291.1 triliun (US\$ 25 miliar) dan subsidi listrik menjadi IDR 72.4 triliun (US\$ 6,2 miliar), sehingga total subsidi energi di Indonesia menjadi 26,4 persen lebih tinggi.

### Usulan Widodo untuk Berbagi Beban Kenaikan Harga BBM Ditolak

Usulan untuk berbagi beban kenaikan harga BBM antara pemerintahan saat ini dengan pemerintahan yang baru terpilih ditepis oleh Presiden Yudhoyono. Tim ekonomi presiden terpilih Joko Widodo sebelumnya mengusulkan agar Presiden Yudhoyono menaikkan harga BBM sebesar 20 persen pada sisa masa jabatannya, sedangkan pemerintahan yang baru akan menaikkan harga BBM sebesar 20 persen setelah Widodo mulai menjabat.

Gugus tugas untuk mengelola transisi dari pemerintahan Yudhoyono ke Widodo yang diberi nama Rumah Transisi Widodo-Kalla, yang dipimpin oleh mantan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Rini Soemarno, dibentuk beberapa saat setelah KPU mengumumkan kemenangan Widodo. Terkait subsidi BBM, usulan awal dari tim transisi ini adalah membagi tugas menaikkan harga BBM dengan pemerintahan Yudhoyono. Menurut prosedur yang selama ini berlaku, subsidi BBM Indonesia akan diputuskan sebagai bagian dari APBN 2015 yang tahun ini diusulkan oleh pemerintahan Yudhoyono dan dirundingkan bersama dengan DPR, oleh karena itu

pembicaraan tentang kebijakan subsidi BBM kemudian terpusat pada negosiasi tentang rancangan anggaran negara (GSI-IISD, 2014a).

Pembicaraan tersebut di atas semakin mendapatkan perhatian serius setelah pada 21 Agustus lalu Mahkamah Konstitusi dalam gugatan yang diajukan oleh calon presiden Prabowo Subianto, mendukung hasil pemilu yang memberi kemenangan pada Widodo. Keputusan MK tersebut mengukuhkan posisi Widodo sebagai presiden baru Indonesia untuk masa jabatan 2014-2019. Selanjutnya, Yudhoyono dan Widodo melangsungkan pertemuan tertutup di Bali pada tanggal 7 Agustus (Voice of America, 2014).

Meskipun pembicaraan di antara keduanya disebut sebagai pembicaraan biasa tentang hal-hal umum seperti transisi politik dan APBN mendatang, kebanyakan media di Indonesia secara konsisten dari hari ke hari memberikan perhatian khusus tentang pembicaraan di seputar harga BBM. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa Widodo mendukung pengurangan subsidi BBM, namun keinginannya harus dirundingkan dengan Yudhoyono, karena Widodo akan mengelola tahun pertama masa pemerintahannya dengan APBN yang

disusun oleh pemerintahan Yudhoyono.

Presiden Yudhoyono secara diplomatis menjelaskan keputusannya menolak tawaran kenaikan harga BBM dari Widodo melalui akun YouTubenya (Yudhoyono, 2014) dengan mengatakan,

“...Masih ada ruang untuk sebuah perubahan jika pemerintahan baru memandang perlu itu perlu perubahan, itu terbuka. Memang, RAPBN 2015 akan menjadi APBN definitif 2015 pada akhir September tahun ini, sehingga kalau akan ada perubahan, yang terbuka melalui perubahan APBNP 2015, sebagaimana yang dulu kami lakukan pada tahun 2005, kami lakukan perubahan APBN yang disusun oleh pemerintahan Ibu Megawati, pemerintahan sebelumnya. Nah di situ tidak benar kalau ada pikiran tidak ada ruang untuk perubahan atau penyesuaian...”

Khusus tentang isu subsidi, Presiden Yudhoyono menjelaskan,

“...Subsidi selalu dihadapi dari satu pemerintahan ke pemerintahan yang lain bukan hanya pemerintahan sekarang ini. Memang, bagi suatu negara yang menganut sistem yang sangat kapitalistik, atau rakyat sering menyebutnya “neolib” [neo liberal, ed.] begitu, subsidi ini tidak disukai. Tapi saya berpendapat lain, untuk Indonesia, mengingat masih banyak saudara-saudara kita yang miskin dan yang daya belinya rendah, kalau subsidi itu betul-betul untuk menolong rakyat, jumlahnya tidak berlebihan, dan juga tepat sasaran, saya kira tidak keliru... dan saya berpendapat makin ke depan, samam yang disampaikan banyak pihak, makin ke depan subsidi ini dapat dikurangi jumlahnya...”

Yudhoyono kemudian menambahkan,

“...Tekanan ataupun desakan kepada pemerintah yang saya pimpin untuk meningkatkan BBM ini boleh dikata luar biasa... [Se]ingat saya, tahun 2004 dulu saya tidak mendesak pemerintahan yang ada untuk segera menaikkan harga bahan bakar minyak... Alasannya agar bisa menurunkan defisit, nah kalau itu kan kami sudah melakukan langkah-langkah untuk itu; tahun lalu sekali lagi BBM sudah kami naikan, tahun ini naikkan harga listrik, bahan bakar gas, pemotongan anggaran kan itu dalam rangka mengurangi defisit. Dan jangan lupa, sebetulnya, dulu setiap pemerintah mengusulkan kenaikan BBM selalu ditolak oleh kalangan DPR, sejumlah fraksi bahkan sejak awal tidak pernah setuju kalau saya menaikkan harga BBM [sic!]... Justru sekarang mengapa tiba-tiba kami dipaksa untuk menaikkan harga

BBM. Tidakkah meningkatkan kemiskinan, tidakkah membebani masyarakat kita?... Tetapi saya kan juga memantau perkembangan... apabila dalam waktu tujuh minggu ke depan ini tiba-tiba ada perubahan situasi yang dramatis, harga minyak mentah dunia meroket misalnya, dan kalau saya tidak naikkan BBM, APBN kita jebol, pasti, dengan terpaksa saya naikkan.”

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa kecil kemungkinan terjadi penyesuaian harga BBM dalam sisa masa pemerintahan Yudhoyono yang tinggal beberapa minggu ke depan. Hal ini juga menunjukkan bahwa APBN 2015 tidak akan mengakomodasi manuver apapun yang memungkinkan pemerintahan yang baru mengubah harga bahan bakar, setidaknya hingga proses revisi APBN terbuka di 2015.

Peluang Widodo untuk melakukan penyesuaian harga dalam jangka pendek masih belum tertutup. Jendela terdekat untuk menerapkan agenda reformasi dalam APBN saat ini sedang terjadi dalam perundingan yang sedang berjalan tentang APBN 2015 di DPR. Namun demikian, konfigurasi politik mutakhir di DPR mungkin tidak cukup untuk menghasilkan dukungan yang diperlukan oleh Widodo. Widodo menegaskan akan mempertahankan koalisi yang ketat ditimbang mengakomodasi berbagai partai politik dalam pemerintahannya. Elemen utama koalisi baru yang dipimpin oleh PDI-P hanya sebesar 37 persen, jauh lebih sedikit dari jumlah mayoritas (simple majority) yang diperlukan untuk mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

**Tabel 1. Hasil Pemilu Legislatif Indonesia 2014**

Nama Partai	Kursi	Persentase
<b>Koalisi Berkuasa</b>		<b>37.0</b>
PDI-P	109	19.5
Nasdem	35	6.3
PKB	47	8.4
Hanura	16	2.9
<b>Netral</b>		
Partai Demokrat	61	10.9
<b>Di Luar Koalisi Berkuasa</b>		<b>52.1</b>
Gerindra	73	13.0
Golkar	91	16.3
PKS	40	7.1
PAN	49	8.8
PPP	39	7.0
<b>Total</b>	<b>560</b>	<b>100.0</b>

Sumber: Komisi Pemilihan Umum (2014)

## Proposal APBN: Subsidi BBM Indonesia pada 2015

Alokasi belanja subsidi BBM yang diusulkan untuk tahun anggaran 2015 telah ditetapkan sebesar 38 persen lebih tinggi daripada yang disetujui di APBN 2014 awal, atau 18 persen lebih tinggi dari Revisi APBN 2014. Nilai subsidi BBM meningkat dari Rp. 210,7 triliun (US\$ 18,1 miliar) dalam APBN 2014 menjadi Rp. 291,1 triliun (US\$ 25,0 miliar) dalam Proposal APBN 2015. Kenaikan belanja subsidi BBM adalah tren yang telah berlangsung sejak 2009. Nilai subsidi BBM yang diusulkan untuk 2015 setara dengan 21,1 persen dari total pengeluaran pemerintah pusat.

Alokasi belanja subsidi listrik yang diusulkan telah ditetapkan sebesar 1,5 persen lebih tinggi daripada yang disetujui di APBN 2014 awal, atau 30 persen lebih rendah daripada Revisi APBN 2014. Subsidi listrik naik dari Rp. 71,4 triliun (US\$ 7,1 miliar) di APBN 2014 menjadi Rp. 72,4 triliun (US\$ 6,2 miliar) di 2015. Laju pertumbuhan yang subsidi listrik yang lebih rendah disebabkan oleh kebijakan yang dijalankan untuk menyesuaikan tarif listrik dan menghilangkan subsidi untuk sejumlah kelas tarif dalam dua tahun terakhir. Nilai subsidi listrik yang diusulkan pada 2015 setara dengan 5,3 persen dari total pengeluaran pemerintah pusat.

APBN Indonesia dalam praktiknya selalu direvisi pada semester pertama setiap tahunnya dalam rangka

penyesuaian anggaran yang didasarkan pada analisa kinerja ekonomi selama kuartal pertama. Meskipun bukan merupakan hal yang wajib dilakukan, negosiasi antara pemerintah dengan DPR terkait penyesuaian APBN telah menjadi hal yang rutin setiap tahunnya, yang dalam kebanyakan kasus berakhir dengan nilai subsidi BBM yang lebih tinggi.

Chatib Basri, Menteri Keuangan saat ini, menjelaskan bahwa nilai subsidi BBM yang lebih tinggi di tahun 2015 dibuat berdasarkan asumsi bahwa pada tahun tersebut tidak akan terjadi penyesuaian harga lagi. Dari nilai total subsidi BBM, sebesar Rp. 44,6 triliun dialokasikan untuk menutup biaya subsidi yang belum dibayarkan dari tahun sebelumnya, dan menyisakan Rp. 246 triliun untuk menutup kuota konsumsi sebesar 48 kiloliter BBM bersubsidi (Detik, 2014a). Pada 2014, pemerintah mengalokasikan 46 juta kiloliter BBM bersubsidi, dengan total nilai sebesar Rp. 246,49 triliun. Dengan pertimbangan bahwa pemerintah memperkirakan rupiah akan melemah terhadap dolar AS pada 2015, maka nilai subsidi BBM kemungkinan akan dikaji kembali tahun depan.

Widodo berusaha merundingkan postur APBN yang dapat mendukung visinya untuk mengurangi subsidi BBM. Sehari setelah Proposal APBN 2015 diumumkan, Widodo menyatakan ketidaksetujuannya terhadap subsidi BBM yang jumlahnya dianggap terlalu besar

**Tabel 2. Penjabaran Subsidi Energi dalam Proposal APBN 2015**

	Triliun rupiah			Miliar dolar		
	APBN 2014	Revisi APBN 2014	Proposal APBN 2015	APBN 2014	Revisi APBN 2014	Proposal APBN 2015
Subsidi BBM <sup>1</sup>	210.7	246.5	291.1	18.1	21.2	25.0
Subsidi Listrik	71.4	103.8	72.4	6.1	8.9	6.2
Total	282.1	350.3	363.5	24.3	30.1	31.3

1. Termasuk biofuel, LPG 3kg, dan gas cair untuk kendaraan bermotor.

Sumber: Proposal APBN 2015

**Tabel 3. Asumsi Makroekonomi APBN**

Deskripsi	Revisi APBN 2015	Rencana APBN 2015
Pertumbuhan (%)	5.5	5.6
Inflasi (% yoy)	5.3	4.4
Nilai tukar Rp/US\$	11,600	11,900
Tingkat suku bunga (%)	6.0	6.2
Harga minyak mentah Indonesia (US\$/bl)	105	105
Produksi minyak mentah (ribu barel per hari)	818	845
Produksi gas alam (setara ribu barel minyak per hari)	1,224	1,248

Sumber: Proposal APBN 2015

dalam rencana APBN dengan mengatakan bahwa ia tidak menyukai besarnya nilai subsidi tersebut dan berharap jumlahnya dapat dikurangi (Detik, 2014b). Widodo dan timnya mempertanyakan keselarasan proposal APBN dengan arah kebijakan yang akan diambil oleh pemerintahannya (Solo Pos, 2015). Presiden Yudhoyono secara terbuka membantah tuduhan bahwa rencana APBN yang disusun pemerintahannya akan menghambat pemerintahan baru, sementara di saat yang sama mempertahankan langkah yang diambilnya dengan mengatakan bahwa “setiap pemerintahan memiliki tantangannya masing-masing”.

Tabel di bawah ini merangkum pernyataan-pernyataan dari sembilan fraksi politik di DPR saat ini terhadap klausul subsidi BBM dalam Rencana APBN 2015. Indikasi atas sikap fraksi yang “mendukung” atau “menentang” subsidi di bawah disimpulkan berdasarkan tafsir atas muatan dari pernyataan resmi pandangan fraksi-fraksi. Hanya terdapat dua fraksi, yaitu Hanura dan PPP, yang meminta pengurangan subsidi BBM,

sementara Gerindra menuntut adanya perubahan sistem subsidi BBM yang lebih signifikan. Fraksi politik lain, kecuali PAN, menunjukkan dukungan terhadap keberlangsungan subsidi BBM, dengan komentar tambahan yang mendorong agar mekanismenya diperbaiki. Hal yang menarik adalah posisi PDI-P - yang merupakan partai asal Widodo dan oposisi utama terhadap penghapusan subsidi BBM selama 10 tahun masa pemerintahan Yudhoyono – saat ini bersikap mendukung keberlangsungan subsidi BBM. Sikap tersebut berlawanan dengan rencana Widodo untuk menghapuskannya secara bertahap. Maruarar Sirait, Ketua PDI-P, mengkritik pemikiran bahwa kegagalan mengurangi konsumsi bahan bakar melalui peningkatan efisiensi telah menyebabkan harga BBM harus dinaikkan. Ia berpendapat bahwa masih ada banyak jalan untuk meningkatkan pendapatan pemerintah dari pertambangan dan pajak, dan jika hal tersebut dapat dilakukan pada masa pemerintahan Widodo-Kalla, maka kenaikan harga BBM dapat dihindari (Republika, 2014).

**Tabel 4. Tanggapan Faksi-faksi Politik terhadap Isu Subsidi BBM dalam Proposal APBN 2015**

Partai	Sikap terhadap subsidi BBM		Catatan dari Tanggapan Faksi-faksi Politik terhadap Proposal APBN 2015
	Mendukung	Menentang	
PDI-P	X		Pemerintah perlu memiliki kriteria yang jelas untuk memastikan subsidi energi tepat sasaran; pengeluaran pemerintah untuk membiayai SKK Migas dilakukan melalui mekanisme APBN; kepatuhan terhadap ketentuan cost recovery dan perpajakan sektor migas.
PKB	X		[Alokasi anggaran subsidi...] di satu sisi menunjukkan pemerintah masih konsisten untuk memperhatikan kondisi masyarakat miskin di Indonesia; Alokasi anggaran subsidi ini harus dikelola secara efisien dan diarahkan lebih tepat sasaran guna memperbaiki kualitas belanja negara dengan didukung basis data yang transparan dan menggunakan sistem penyaluran subsidi yang lebih kredibel dan akuntabel.
Hanura		X	Pemerintah perlu mengurangi pengeluaran belanja subsidi energi dengan menerapkan ketahanan energi nasional yang memanfaatkan sumber-sumber energi lainnya yang terbarukan atau diversifikasi energi yang membatasi impor migas.
Partai Demokrat	X		Mendukung kebijakan pemerintah untuk mengubah sistem subsidi, dari subsidi harga menjadi subsidi tepat sasaran, sehingga alokasi anggaran subsidi hanya untuk meringankan beban masyarakat untuk memperoleh kebutuhan dasar, memberikan perlindungan pada masyarakat berpendapatan rendah, serta memberikan insentif bagi dunia usaha dan masyarakat.
Gerindra		X	[Kami] sangat menyayangkan bahwa hutang sebesar tersebut habis dibakar di jalanan hanya untuk menutup subsidi BBM. Kami mendorong pemerintah untuk melakukan restrukturisasi secara tuntas terhadap pola subsidi energi sehingga di masa yang akan datang tidak lagi membebani APBN.
Golkar	X		Subsidi BBM adalah instrumen fiskal untuk meringankan beban masyarakat, sehingga sangat diperlukan dan juga untuk menunjukkan keberpihakan Negara terhadap perlindungan rakyat kecil; Diperlukan evaluasi komprehensif menyangkut subsidi, mekanisme, pola dan kelompok sasarannya agar subsidi yang diberikan lebih tepat sasaran sesuai amanah Konstitusi khususnya pasal 34 UUD 1945
PKS	X		Pemerintah perlu memastikan agar kuota subsidi energi tidak mengalami pembengkakan dengan kebijakan pengaturan yang lebih baik dan diversifikasi energi secara sungguh-sungguh.
PAN	-	-	PAN tidak memberikan tanggapan terhadap isu subsidi BBM.
PPP	-	-	PPP tidak memberikan posisi yang jelas terhadap isu subsidi BBM, namun menyatakan bahwa masih belum ada upaya yang serius untuk mengatasi tingginya beban subsidi BBM dan listrik secara signifikan.

Sumber: Tanggapan Faksi-faksi Politik terhadap Proposal APBN 2015.

## Pemerintah Menarik Kebijakan Pembatasan Pasokan BBM Bersubsidi

Pada 27 Agustus, Hanung Budya, Direktur Pemasaran dan Niaga PT Pertamina, mengadakan konferensi pers untuk mengumumkan normalisasi pasokan BBM bersubsidi di tengah meningkatnya kegelisahan masyarakat di berbagai daerah di Indonesia (Liputan6, 2014). Keputusan tersebut diambil sesuai dengan instruksi pemerintah untuk menghapus pembatasan akses kepada BBM bersubsidi yang telah terjadi sejak awal Agustus (lihat GSI-IISD, 2014a).

Sebagaimana dijelaskan dalam edisi bulan Juli news briefing ini (GSI-IISD, 2014b), komitmen untuk mengurangi konsumsi BBM bersubsidi diambil karena pemerintah Indonesia memandang tertutupnya kemungkinan menaikkan harga BBM dalam APBN Perubahan 2014. Akibatnya, pemerintah menjalankan sejumlah program yang ditujukan untuk membatasi konsumsi BBM bersubsidi. Program-program tersebut adalah:

- Membatasi penjualan BBM bersubsidi di Stasiun Penjualan Bahan Bakar Umum (SPBU), yang dikenal sebagai kebijakan “nozzle reduction”;
- Menghentikan penjualan BBM bersubsidi di 26 SPBU di Jakarta Pusat dan di seluruh SPBU sepanjang jalan tol;
- Menerapkan pembatasan waktu (antara pukul 8 pagi hingga 6 sore) untuk penjualan BBM bersubsidi di wilayah-wilayah yang dianggap rentan distribusi ilegal.

Dalam implementasi program-program tersebut, pada awal Agustus, PT Pertamina memotong pasokan BBM bersubsidi sebesar 5 persen dan penjualan solar bersubsidi sebesar 15 hingga 20 persen di seluruh SPBU. Keputusan ini segera diikuti dengan banyaknya antrean di berbagai wilayah di Indonesia. Di jalur Pantura yang merupakan jalur utama logistik dan transportasi Pulau Jawa, antrean dapat mencapai satu kilometer dan berlangsung selama berjam-jam di beberapa daerah. Sejumlah pembeli bahkan bermalam di SPBU untuk mendapatkan giliran untuk membeli BBM. (Republika, 2014b; Merdeka, 2014; MetroTV, 2014). Kasus-kasus orang pingsan karena kelelahan atau kepanasan mengantri BBM dilaporkan di beberapa tempat, dan di Wates, seorang laki-laki meninggal dunia karena sakit jantung setelah mengantre selama berjam-jam (Bangka Pos, 2014). Di Yogyakarta, seorang pengendara motor menjadi sensasi media setelah memantik keresahan bernuanasa etnis dalam ungkapan kekesalannya di media sosial akibat tidak dilayani petugas SPBU saat ia mengantri di

jalur mobil sebagai upaya menghindari antrian motor yang panjang (The Jakarta Globe, 2014; Tempo, 2014).

Berlawanan dengan kepercayaan umum bahwa kebijakan pembatasan tidak berdampak pada konsumsi BBM, M. Iskandar, Wakil Presiden Pemasaran BBM PT PERTAMINA, melaporkan bahwa antara 18 hingga 25 Agustus kebijakan tersebut telah mengurangi konsumsi diesel bersubsidi sebesar 13 persen dan bensin bersubsidi sebesar 5 persen, serta meningkatkan konsumsi bensin non-subsidi dari 2.800 kiloliter menjadi 3.300 kiloliter per hari (Katadata, 2014). Namun demikian, hal ini masih dipandang tidak signifikan untuk mencapai target kuota tahunan.

Selama pelaksanaan kebijakan pembatasan ini, pemerintah berupaya keras untuk meredam kegelisahan masyarakat luas serta isu miring tentang terjadinya kelangkaan BBM. Para pejabat dari berbagai kementerian dan PT Pertamina mengeluarkan pernyataan untuk meredam keresahan tersebut dengan memberikan penjelasan bahwa meskipun BBM bersubsidi dikurangi, pasokan BBM non-subsidi masih tersedia luas dan tidak ada masalah dalam pendistribusian pasokan tersebut (Kementrian ESDM, 2014; Okezone, 2014).

Bagi Indonesia, ini adalah ujian terhadap ide bahwa “masyarakat akan bersedia membayar harga BBM yang lebih tinggi selama mudah didapatkan dan pasokannya stabil” (Okezone, 2012; Merdeka, 2014 Liputan6, 2014). Pandangan ini mendapatkan dukungan oleh kasus-kasus nyata di lapangan, khususnya yang terjadi di wilayah yang sulit dijangkau, di mana harga BBM jauh lebih tinggi dibandingkan harga rata-rata di tempat lain di Indonesia, namun masyarakat setempat terus membeli produk-produk BBM tersebut.

Ini bukan yang pertama kalinya pemerintah menarik kebijakan yang dimaksudkan untuk mengontrol konsumsi BBM. Sebelumnya pada Februari 2014, kebijakan untuk mengurangi subsidi untuk sektor perikanan ditarik kembali karena dianggap tidak sesuai dengan peraturan lainnya (GSI-IISD, 2014). Sementara pada tahun sebelumnya, kebijakan harga ganda (double pricing) – yang dimaksudkan untuk menerapkan dua harga yang berbeda untuk satu jenis produk, yaitu dengan menjual sebagian produk dengan harga bersubsidi dan sebagian lain dengan harga non-subsidi – dibatalkan bahkan sebelum sempat dilaksanakan, walaupun sejumlah SPBU telah mempersiapkan diri untuk menjalankan kebijakan tersebut (GSI-IISD, 2013).

## Referensi

Bangka Pos (2014, August 31). Antri BBM, Sujidin Meninggal di SPBU. Retrieved from: <http://bangka.tribunnews.com/2014/08/31/antri-bbm-sujidin-meninggal-di-spbu>

Detik (2014a, August 15). Subsidi BBM Naik 18%, Chatib Basri Ungkap Penyebabnya. Retrieved from: <http://finance.detik.com/read/2014/08/15/200834/2663880/1034/subsidi-bbm-naik-18-chatib-basri-ungkap-penyebabnya>

Detik. (2014b, August 17). Tim Transisi: Jokowi Akan Kurangi Subsidi BBM. Retrieved from: <http://finance.detik.com/read/2014/08/17/155354/2664520/1034/tim-transisi-jokowi-akan-kurangi-subsidi-bbm>

General Election Commission. Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 416/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pemilihan Umum tahun 2014. Retrieved from: [http://www.kpu.go.id/koleksigambar/SK\\_KPU\\_416\\_Penetapan\\_Kursi\\_Calon\\_Terpilih\\_1452014.pdf](http://www.kpu.go.id/koleksigambar/SK_KPU_416_Penetapan_Kursi_Calon_Terpilih_1452014.pdf)

Global Subsidies Initiative - International Institute for Sustainable Development (GSI – IISD). (2014, August 14). Indonesia Energy Subsidies Briefing August 2014 – English. Retrieved from: [http://www.iisd.org/GSI/sites/default/files/ffs\\_newsbriefing\\_indonesia\\_aug2014\\_eng.pdf](http://www.iisd.org/GSI/sites/default/files/ffs_newsbriefing_indonesia_aug2014_eng.pdf)

Global Subsidy Initiatives - International Institute for Sustainable Development (GSI – IISD). (2014). Indonesia Energy Subsidies Briefing June 2014 – English. Retrieved from: [www.iisd.org/gsi/sites/.../ffs\\_newsbriefing\\_indonesia\\_jun2014\\_eng.pdf](http://www.iisd.org/gsi/sites/.../ffs_newsbriefing_indonesia_jun2014_eng.pdf)

Global Subsidies Initiative - International Institute for Sustainable Development (GSI – IISD). (2014b, July 10). Indonesia Energy Subsidies Briefing July 2014 – English. Retrieved from: [http://www.iisd.org/gsi/sites/default/files/ffs\\_newsbriefing\\_indonesia\\_july2014\\_eng.pdf](http://www.iisd.org/gsi/sites/default/files/ffs_newsbriefing_indonesia_july2014_eng.pdf)

Global Subsidies Initiative - International Institute for Sustainable Development (GSI – IISD). (2013). Indonesia Energy Subsidies Briefing July 2013 – English. Retrieved from: [www.iisd.org/gsi/sites/.../ffs\\_newsbriefing\\_indonesia\\_july2013\\_eng.pdf](http://www.iisd.org/gsi/sites/.../ffs_newsbriefing_indonesia_july2013_eng.pdf)

Global Subsidies Initiative - International Institute for Sustainable Development (GSI – IISD). (2012). Indonesia's Fuel Subsidies: Action plan for reform. Retrieved from: [http://www.iisd.org/gsi/sites/default/files/ffs\\_actionplan\\_indonesia.pdf](http://www.iisd.org/gsi/sites/default/files/ffs_actionplan_indonesia.pdf)

Katadata. (2014, August 27). Pembatasan BBM, Konsumsi Premium Turun 5 Persen. Retrieved from: <http://katadata.co.id/berita/2014/08/27/pembatasan-bbm-konsumsi-premium-turun-5-persen>

Liputan6. (2014, August 27). Pembatasan Dicabut, Premium Habis 20 Desember & Solar 5 Desember. Retrieved from: <http://bisnis.liputan6.com/read/2097058/pembatasan-dicabut-premium-habis-20-desember-solar-5-desember>

Liputan6. (2014, August 27). Warga Papua Biasa Beli BBM Rp 50 Ribu per Liter. Retrieved from: <http://bisnis.liputan6.com/read/2097287/warga-papua-biasa-beli-bbm-rp-50-ribu-per-liter>

Merdeka/ (2014, August 24). Tegal mulai dilanda kelangkaan BBM premium. Retrieved from: <http://www.merdeka.com/peristiwa/tegal-mulai-dilanda-kelangkaan-bbm-premium.html>

Merdeka. (2014, July 2013). Harga gas naik, pengusaha pilih bayar mahal asal pasokan ada. Retrieved from: <http://www.merdeka.com/uang/harga-gas-naik-pengusaha-pilih-bayar-mahal-asal-pasokan-ada.html>

Metrotvnews. (2014, August 28). BBM Langka, Nelayan dan Warga Reli Menginap di SPBU. Retrieved from: <http://news.metrotvnews.com/read/2014/08/28/283839/bbm-langka-nelayan-dan-warga-rela-menginap-di-spbu>

Ministry of Energy and Mineral Resources (MOEMR). (2014, August 27). Tidak Ada Kelangkaan BBM, BBM Tetap

Tersedia. Retrieved from: <http://www.esdm.go.id/berita/migas/40-migas/6905-tidak-ada-kelangkaan-bbm-bbm-tetap-tersedia.html>

Okezone. (2014, August 27). BBM Langka, CT Koordinasi dengan Pertamina & Menteri ESDM. Retrieved from: <http://economy.okezone.com/read/2014/08/27/19/1030348/bbm-langka-ct-koordinasi-dengan-pertamina-menteri-esdm>

Okezone. (2012, March 12). BBM Naik Tidak Apa-apa, Asal Tidak Langka. Retrieved from: <http://idsaham.com/news-saham-quotBBM-Naik-Tidak-Apa-apa-Asal-Tidak-Langkaquot-256749.html>

Republika. (2014, August 28). Politisi PDIP Ini Tolak Wacana Kenaikan BBM. Retrieved from: <http://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/14/08/28/nb0sph-politisi-pdip-ini-tolak-wacana-kenaikan-bbm>

Republika. (2014b, August 22). Di Pantura, Pembatasan BBM Bersubsidi Berefek Antrian Panjang. Retrieved from: <http://www.republika.co.id/berita/nasional/jawa-barat-nasional/14/08/22/naplzq-di-pantura-pembatasan-bbm-bersubsidi-berefek-antrian-panjang>

Solo Pos. (2014, August 19). Dibebani Subsidi, Pemerintah Baru Diminta Realisasikan Janji Kampanye, Bagaimana Bisa? Retrieved from: <http://www.solopos.com/2014/08/19/rapbn-2015-dibebani-subsidi-pemerintah-baru-diminta-realisasikan-janji-kampanye-bagaimana-bisa-528014>

State Budget Proposal 2015.

Tempo. (2014, August 29). Florence Sihombing Apologizes for Insulting Yogyakarta Residents. Retrieved from: <http://en.tempo.co/read/news/2014/08/29/055603065/Florence-Sihombing-Apologizes-for-Insulting-Yogyakarta-Residents>

The Jakarta Globe/ (2014, August 30). Police Arrest Student for Social Media Post Calling Yogyakarta 'Poor, Stupid and Uncultured'. Retrieved from: <http://www.thejakartaglobe.com/news/police-arrest-student-social-media-post-calling-yogyakarta-poor-stupid-uncultured/>

Voice of America. (2014, August 29). Presiden SBY-Jokowi Adakan Pertemuan Empat Mata di Bali. Retrieved from: <http://www.voaindonesia.com/content/sby-dan-jokowi-adakan-pertemuan-di-nusa-dua-/2429633.html>

Yudhoyono, S.B. (2014, August 29). "Tidak Mau Bebani Rakyat, Presiden SBY Pertahankan Harga BBM". YouTube video. Retrieved from: [https://www.youtube.com/watch?list=PLAqZNhQRe6Dc\\_t6Sj1zNEB4tR8xAO1SoA&v=8cat28jD70A#t=196](https://www.youtube.com/watch?list=PLAqZNhQRe6Dc_t6Sj1zNEB4tR8xAO1SoA&v=8cat28jD70A#t=196)

Published by the International Institute for Sustainable Development.

International Institute for Sustainable Development  
Head Office  
161 Portage Avenue East, 6th Floor, Winnipeg, Manitoba, Canada R3B 0Y4  
Tel: +1 (204) 958-7700 | Fax: +1 (204) 958-7710 | Web site: [www.iisd.org](http://www.iisd.org)

### **About IISD**

The International Institute for Sustainable Development (IISD) contributes to sustainable development by advancing policy recommendations on international trade and investment, economic policy, climate change and energy, and management of natural and social capital, as well as the enabling role of communication technologies in these areas. We report on international negotiations and disseminate knowledge gained through collaborative projects, resulting in more rigorous research, capacity building in developing countries, better networks spanning the North and the South, and better global connections among researchers, practitioners, citizens and policy-makers.

IISD's vision is better living for all—sustainably; its mission is to champion innovation, enabling societies to live sustainably. IISD is registered as a charitable organization in Canada and has 501(c)(3) status in the United States. IISD receives core operating support from the Government of Canada, provided through the Canadian International Development Agency (CIDA), the International Development Research Centre (IDRC), and from the Province of Manitoba. The Institute receives project funding from numerous governments inside and outside Canada, United Nations agencies, foundations and the private sector.

### **About GSI**

GSI is an initiative of the International Institute for Sustainable Development (IISD). GSI puts a spotlight on subsidies—transfers of public money to private interests—and how they impact efforts to put the world economy on a path toward sustainable development. In cooperation with a growing international network of research and media partners, GSI seeks to lay bare just what good or harm public subsidies are doing; to encourage public debate and awareness of the options that are available for reform; and to provide policy-makers with the tools they need to secure sustainable outcomes for our societies and our planet.

International Institute for Sustainable Development  
Global Subsidies Initiative  
International Environment House 2  
9 chemin de Balaxert, 1219 Châtelaine,  
Geneva, Switzerland

[cbeaton@iisd.org](mailto:cbeaton@iisd.org)  
[lucky.lontoh@iisd.org](mailto:lucky.lontoh@iisd.org)

Tel: +41 22 917-8373  
Fax: +41 22 917-8054

<http://www.iisd.org/gsi/>